

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Kewilayahan Kabupaten dan Kotamadya Di Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa. Jawa Barat memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan ibu kota negara yaitu Jakarta. Sehingga setiap pertumbuhan yang terjadi akan mengikuti kondisi yang terjadi di Jakarta. Hal ini juga berimbas terhadap pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh pemda. Dimana sarana dan prasarana harus mendukung berbagai bidang terutama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Dan saat ini sebagian kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat telah memisahkan diri, dengan melakukan pemekaran membentuk provinsi baru. Yaitu Provinsi Banten, dengan enam kabupaten dan kotamadya didalamnya sebagai daerah administrasi tingkat II. Akibatnya luas wilayah di Jawa Barat menjadi sempit dan jumlah daerah administrasi menjadi berkurang. Dan saat ini hanya terdapat dua puluh lima kabupaten dan kotamadya, serta ditambah satu kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung yang terbentuk tahun 2007 yaitu Kabupaten Bandung Barat.

Adapun kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat yang sekaligus menjadi objek dalam penelitian ini berjumlah dua puluh lima pemda. Adapun kabupaten dan kotamadya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 3.073,89 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 3.716.534 Jiwa (sensus Penduduk 2000).
2. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 127,388 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 1.877.414 Jiwa (Sensus Penduduk 2003).
3. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah sebesar 2.371,21 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 3.074.175 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).
4. Kabupaten Ciamis. memiliki luas wilayah sebesar 3.165,19 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 2.004.875 Jiwa (sensus Penduduk 2000).
5. Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah sebesar 305.148 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 1.586.076 Jiwa (ata BPS 2007).
6. Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah sebesar 989,70 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 2.034.093 Jiwa (Sensus Penduduk 2003).
7. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah sebesar 3.065,19 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 2.204.175 Jiwa (sensus Penduduk 2005).
8. Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah sebesar 3.897,231 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 1.795.372 Jiwa (Data BPS 2007).
9. Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah sebesar 175.327 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 1.771.557 Jiwa.
10. Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah sebesar 1.117 Km². Dan jumlah penduduk sebesar 932.720 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).
11. Kabupaten Majalengka memiliki luas wilayah sebesar 1.204,24 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 1.111.641 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).

12. Kabupaten Purwakarta memiliki luas wilayah sebesar 971,72 Km². Dan jumlah penduduk Tahun 2004 diproyeksikan sebanyak 767.071 Jiwa.
13. Kabupaten Subang memiliki luas wilayah sebesar 15.198,23 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 1.496.077 Jiwa (Data BPS 2007).
14. Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah sebesar 4.128 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 2.059.920 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).
15. Kabupaten Sumedang memiliki luas wilayah sebesar 1.552,21 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 1.043.340 Jiwa.
16. Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas wilayah sebesar 2.563,35 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 1.535.859 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).
17. Kotamadya Bandung memiliki luas wilayah sebesar 167,45 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 2.136.260 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).
18. Kotamadya Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 210,49 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 1.637.610 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).
19. Kotamadya Bogor memiliki luas wilayah sebesar 11.850 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 745.666 Jiwa (Sensus Penduduk tahun 2004).
20. Kotamadya Cirebon memiliki luas wilayah sebesar 3.753,82 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 272.263 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).
21. Kotamadya Depok memiliki luas wilayah sebesar 20.029 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 3.716.534 Jiwa (sensus Penduduk 2000).
22. Kotamadya Sukabumi memiliki luas wilayah sebesar 4.800,231 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 269.142 Jiwa (Sensus Penduduk 2002).

23. Kotamadya Cimahi memiliki luas wilayah sebesar 4.103,73 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 442.549 Jiwa (Sensus Penduduk 2000).

24. Kotamadya Tasikmalaya memiliki luas wilayah sebesar 127,388 Ha. Dan jumlah penduduk sebanyak 624.478 Jiwa (Data BPS 2007).

25. Kotamadya Banjar memiliki luas wilayah sebesar 13.197,23 Km². Dan jumlah penduduk sebanyak 2.136.260 Jiwa (sensus penduduk 2000).

Berdasarkan jumlah penduduk yang harus dilayani dan luas wilayah yang dimiliki oleh setiap pemda di Jawa Barat, maka pemda diharapkan mampu memberikan pelayanan berupa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh publik. Dengan terdapat sarana dan prasarana publik yang memadai pada wilayah yang dimiliki pemda, menunjukkan bahwa pemda telah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Hal itu juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan di daerah dan memberikan pelayanan kepada publik.

4.1.2 Deskriptif Data Variabel Penelitian

4.1.2.1 Deskriptif Data Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu (Abdul Halim, 2002: 65):

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Bagi hasil usaha daerah
4. Lain-lain PAD

Adapun nilai PAD yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai pertumbuhan realisasi PAD. Dan untuk memperoleh nilai tersebut digunakan formula rasio pertumbuhan pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}}$$

(Mahmudi, 2006:125)

Ket: n : tahun anggaran
PAD : pendapatan asli daerah

Sedangkan hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan PAD untuk kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah.

Berdasarkan tabel 4.1 di bawah, untuk tahun anggaran 2006 yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2005, menunjukkan bahwa, terdapat dua pemda yang mengalami pertumbuhan PAD di atas 50% yaitu Kabupaten Majalengka sebesar 55,07% dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 56,02%. Sedangkan pemda yang pertumbuhan PAD-nya sangat rendah, yaitu mendekati nilai 0% atau dapat juga dikatakan memiliki jumlah PAD yang hampir sama dengan tahun lalu yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sukabumi, dengan nilai masing-masing seperti terlihat pada tabel 4.1 di bawah.

Berdasarkan tabel 4.1 di bawah juga dapat dilihat untuk tahun anggaran 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006 menunjukkan bahwa terdapat beberapa pemda yang mengalami penurunan pertumbuhan PAD yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu dengan nilai penurunan masing-masing pemda seperti terlihat pada tabel 4.1. Dan

hanya satu pemda yang mengalami kenaikan pertumbuhan PAD diatas 50% yaitu Kabupaten Ciamis sebesar 51,1%.

Tabel 4.1
Data Pendapatan Asli Daerah
pada Kabupaten dan Kotamadya Di Jawa Barta

NO	KAB/KOTA	PENDAATAN ASLI DAERAH (Rp.)			% PERTUMBUHAN	
		2007	2006	2005	2007	2006
1	Kab. Bandung	147.630.987.490,05	137.532.999.196,23	108.322.354.701,61	7,34	26,97
2	Kab. Bekasi	196.320.104.849,44	172.659.680.141,97	170.950.178.358,39	13,70	0,01
3	Kab. Bogor	265.371.324.234,35	230.103.978.513,00	199.079.508.035,23	15,33	15,58
4	Kab. Ciamis	54.711.929.114,00	36.207.946.469,00	35.849.451.949,51	51,10	0,01
5	Kab. Cianjur	69.277.703.810,00	60.622.839.474,69	50.078.577.557,59	14,28	21,06
6	Kab. Cirebon	100.692.757.876,00	92.348.943.457,00	63.035.103.768,32	9,04	46,50
7	Kab. Garut	76.880.011.092,00	62.952.615.115,00	50.323.323.285,00	22,12	25,10
8	Kab. Indramayu	47.704.563.196,00	51.147.530.185,90	40.247.131.938,00	-6,73	27,08
9	Kab. Karawang	121.414.897.648,00	112.643.722.347,00	83.437.259.649,00	7,79	35,00
10	Kab. Kuningan	43.507.886.549,00	35.732.696.856,50	35.378.907.778,71	21,76	0,01
€	Kab. Majalengka	46.020.646.259,00	50.043.010.324,46	32.270.217.328,70	-8,04	55,07
12	Kab. Purwakarta	50.324.496.708,00	51.781.137.454,00	40.549.707.545,00	-2,81	27,70
13	Kab. Subang	55.628.451.145,00	58.626.201.058,00	45.794.386.764,00	-5,11	28,02
14	Kab. Sukabumi	66.799.344.793,34	53.645.183.151,00	53.114.042.723,76	24,52	0,01
15	Kab. Sumedang	69.493.500.676,00	71.954.644.787,00	58.699.239.115,74	-3,42	22,58
16	Kab. Tasikmalaya	34.725.529.177,00	35.440.800.921,30	22.715.198.568,05	-2,02	56,02
17	Kota Bandung	287.249.534.045,00	253.882.919.542,87	225.596.438.613,00	13,14	12,54
18	Kota Bekasi	171.045.088.714,99	145.730.557.611,44	126.066.835.738,00	17,37	15,60
19	Kota Bogor	79.819.169.545,00	69.300.010.034,00	66.707.298.215,20	15,18	3,89
20	Kota Cirebon	62.785.311.466,00	54.066.030.168,00	43.137.624.477,06	16,13	25,33
21	Kota Depok	86.345.667.454,00	67.218.328.356,49	66.879.059.020,41	28,46	0,51
22	Kota Sukabumi	49.464.332.552,00	43.564.078.599,00	36.577.623.338,00	13,54	19,10
23	Kota Cimahi	55.851.469.205,00	50.325.670.467,00	48.242.903.313,50	10,98	4,32
24	Kota Tasikmalaya	58.604.933.911,17	49.402.378.700,34	35.440.800.921,30	18,63	39,39
25	Kota Banjar	23.615.908.225,45	18.541.972.851,00	13.238.084.891,00	27,36	40,07

Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkan data BPK), 2009

4.1.2.2 Deskriptif Data Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersifat hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaan diserahkan penuh kepada Pemda penerima. UU No. 33 tahun 2004 memberikan pengertian bahwa:

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana ini juga telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan dengan Keputusan Presiden. Sehingga setiap pemda dapat memasukan nilai dari dana ini dengan tepat pada RAPBD. Dan dalam penelitian ini nilai DAU yang digunakan adalah nilai pertumbuhan anggaran maupun realisasi DAU, karena keduanya sama dan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Sehingga nilainya tidak akan berubah antara realisasi maupun anggaran.

Adapun formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai tersebut adalah dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan DAU} = \frac{DAU_n - DAU_{n-1}}{DAU_{n-1}}$$

(Mahmudi, 2006:125)

Ket: n : tahun anggaran
DAU : dana alokasi umum

Sedangkan hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan DAU pada kabupaten dan kota di Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah.

Berdasarkan tabel 4.2 di bawah untuk tahun anggaran 2007 yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa terdapat dua pemda yang mendapatkan kenaikan pertumbuhan DAU dari pemerintah pusat di

atas 50% yaitu Kotamadya Banjar sebesar 74,4% dan Kabupaten Bekasi sebesar 51,05%. Dan pemda yang memperoleh kenaikan pertumbuhan DAU terkecil dari pemerintah pusat yaitu Kabupaten Majalengka sebesar 9,28%.

Tabel 4.2
Data Dana Alokasi Umum
pada Kabupaten dan Kotamadya Di Jawa Barta

NO	KAB/KOTA	DANA ALOKASI UMUM (Rp.)			% PERTUMBUHAN	
		2007	2006	2005	2007	2006
1	Kab. Bandung	1.351.912.000.000,00	1.168.636.000.000,00	802.830.000.000,00	15,68	45,56
2	Kab. Bekasi	430.417.000.000,00	284.954.000.000,00	284.954.000.000,00	51,05	0,00
3	Kab. Bogor	962.196.000.000,00	806.990.000.000,00	603.964.000.000,00	19,23	33,62
4	Kab. Ciamis	775.730.000.000,00	708.553.000.000,00	432.352.000.000,00	9,48	63,88
5	Kab. Cianjur	757.052.000.000,00	675.881.000.000,00	443.536.200.000,00	12,01	52,38
6	Kab. Cirebon	730.886.000.000,00	653.606.000.000,00	455.088.000.000,00	11,82	43,62
7	Kab. Garut	911.801.000.000,00	830.714.900.000,00	520.630.992.000,00	9,76	59,56
8	Kab. Indramayu	610.891.000.000,00	548.042.000.000,00	350.810.000.000,00	11,47	56,22
9	Kab. Karawang	622.602.000.000,00	532.137.960.000,00	344.919.600.000,00	17,00	54,28
10	Kab. Kuningan	550.002.395.600,00	485.246.000.000,00	308.582.000.000,00	13,35	57,25
11	Kab. Majalengka	555.540.000.000,00	508.346.000.000,00	328.468.000.000,00	9,28	54,76
12	Kab. Purwakarta	370.015.255.000,00	311.847.999.996,00	209.379.000.000,00	18,65	48,94
13	Kab. Subang	560.645.000.000,00	502.815.000.000,00	329.954.000.008,00	11,50	52,39
14	Kab. Sukabumi	759.683.000.000,00	684.475.000.000,00	446.400.000.000,00	10,99	53,33
15	Kab. Sumedang	551.711.000.000,00	500.020.000.000,00	316.698.000.000,00	10,34	57,89
16	Kab. Tasikmalaya	718.561.000.000,00	648.149.000.000,00	411.220.000.000,00	10,86	57,62
17	Kota Bandung	827.608.000.000,00	632.379.000.000,00	458.072.000.000,00	30,87	38,05
18	Kota Bekasi	522.199.000.000,00	420.276.000.000,00	313.589.000.000,00	24,25	34,02
19	Kota Bogor	355.776.000.000,00	302.515.000.000,00	214.806.000.000,00	17,61	40,83
20	Kota Cirebon	304.470.000.000,00	259.312.992.000,00	143.039.000.000,00	17,41	81,29
21	Kota Depok	381.095.000.000,00	313.205.000.000,00	239.099.000.000,00	21,68	30,99
22	Kota Sukabumi	285.095.000.000,00	216.741.000.000,00	134.188.000.000,00	31,54	61,52
23	Kota Cimahi	270.848.000.000,00	223.858.000.000,00	161.663.000.000,00	20,99	38,47
24	Kota Tasikmalaya	373.869.708.000,00	320.075.000.000,00	205.408.000.000,00	16,81	55,82
25	Kota Banjar	274.355.662.800,00	157.314.000.000,00	52.871.000.000,00	74,40	197,54

Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkan data BPK), 2009

Berdasarkan tabel 4.2 di atas juga dapat dilihat untuk tahun anggaran 2006 yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2005 menunjukkan bahwa Kotamadya Banjar yang mendapatkan kenaikan pertumbuhan DAU terbesar dari pemerintah pusat yaitu sebesar 197,54%. Sedangkan Kabupaten Bekasi mendapatkan kenaikan pertumbuhan DAU terkecil dari pemerintah pusat yaitu sebesar 0%.

4.1.2.3 Deskriptif Data Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan pemungutan pajak, yang dibagi berdasarkan persentase tertentu antara pusat dan daerah. Dan dana ini tidak bersifat hibah murni. Sedangkan Dana bagi Hasil menurut Nordiawan (2007: 49)

“Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan peraturan pemerintah DBH terbagi kedalam dua macam yaitu DBH sumber daya alam (rinciani terdapat pada PP No 55/2005 pasal 3) dan DBH pajak (rinciani terdapat pada PP No 55/2005 pasal 15). Dan dalam penelitian ini nilai DBH yang digunakan adalah nilai pertumbuhan realisasi DBH. Dan formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan DBH} = \frac{DBH_n - DBH_{n-1}}{DBH_{n-1}}$$

(Mahmudi, 2006:125)

Ket: n : tahun anggaran
DBH : dana bagi hasil

Sedangkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan Dana Alokasi Umum dapat dilihat pada tabel 4,3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Data Dana Bagi Hasil
pada Kabupaten dan Kotamadya Di Jawa Barta

NO	KAB/KOTA	DANA BAGI HASIL (Rp.)			% PERTUMBUHAN	
		2007	2006	2005	2007	2006
1	Kab. Bandung	158.250.575.014,00	104.599.416.457,00	99.674.418.304,00	51,29	4,94
2	Kab. Bekasi	359.015.587.466,00	298.050.421.588,00	260.312.403.037,85	20,45	14,50
3	Kab. Bogor	209.963.317.646,00	160.336.732.762,00	136.209.372.140,51	30,95	17,71
4	Kab. Ciamis	52.343.451.456,00	43.305.670.173,00	25.853.722.234,22	20,87	67,50
5	Kab. Cianjur	75.395.946.166,00	69.445.523.079,00	56.139.042.864,00	8,57	23,70
6	Kab. Cirebon	60.668.676.771,00	58.720.489.870,00	48.745.208.680,00	3,32	20,46
7	Kab. Garut	76.077.919.424,00	56.482.339.351,00	44.283.881.723,00	34,69	27,55
8	Kab. Indramayu	160.699.519.369,00	148.107.279.882,00	133.568.074.598,00	8,50	10,89
9	Kab. Karawang	208.566.182.647,00	185.887.901.565,00	186.788.978.208,00	12,20	-0,48
10	Kab. Kuningan	46.073.769.007,00	46.397.639.977,00	24.810.834.390,00	-0,70	87,01
11	Kab. Majalengka	77.487.224.157,00	67.703.317.365,00	55.831.513.618,00	14,45	21,26
12	Kab. Purwakarta	63.119.875.616,00	62.177.299.827,00	55.326.342.662,00	1,52	12,38
13	Kab. Subang	126.196.114.758,00	109.692.970.253,00	95.872.186.968,00	15,04	14,42
14	Kab. Sukabumi	100.239.076.016,00	56.059.932.812,00	42.347.700.683,95	78,81	32,38
15	Kab. Sumedang	46.264.956.303,00	46.522.799.486,00	38.883.422.914,00	-0,55	19,65
16	Kab. Tasikmalaya	50.598.281.339,00	46.047.486.886,00	37.511.673.080,00	9,88	22,76
17	Kota Bandung	256.390.017.311,00	219.227.383.243,00	198.538.126.887,00	16,95	10,42
18	Kota Bekasi	175.689.082.329,00	296.711.482.518,00	253.167.727.901,00	-40,79	17,20
19	Kota Bogor	90.235.975.568,00	80.483.179.647,00	70.303.873.967,00	12,12	14,48
20	Kota Cirebon	46.590.141.300,00	44.449.944.643,00	37.602.170.368,00	4,81	18,21
21	Kota Depok	121.809.124.577,00	107.481.089.723,00	101.153.422.959,00	13,33	6,26
22	Kota Sukabumi	27.482.251.204,00	50.467.215.352,00	26.475.851.964,00	-45,54	90,62
23	Kota Cimahi	44.341.667.156,00	41.194.171.765,00	36.971.897.347,00	7,64	11,42
24	Kota Tasikmalaya	38.895.570.042,00	38.741.982.989,00	26.498.647.550,00	0,40	46,20
25	Kota Banjar	29.788.838.801,00	31.713.569.575,00	24.783.960.325,00	-6,07	27,96

Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkan data BPK), 2009

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa untuk tahun anggaran 2006 yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2005 Kabupaten Ciamis,

Kabupaten Kuningan, dan Kotamadya Sukabumi memperoleh kenaikan pertumbuhan DBH diatas 50%. Sedangkan yang mendapatkan pertumbuhan DBH terkecil dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Karawang sebesar -0,48%. Dan untuk tahun anggaran 2007 yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa terdapat dua penda yang memperoleh kenaikan Pertumbuhan DBH lebih dari 50% dari pemerintah pusat yaitu Kabupaten Bandung (51,29%) dan Kabupaten Sukabumi (78,81%). Sedangkan yang mengalami penurunan pertumbuhan DBH dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kotamadya Bekasi, Kotamadya Sukabumi, dan Kotamadya Banjar.

4.1.2.4 Deskriptif Data Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007 “belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menambah aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah”. Sehingga anggaran belanja modal merupakan sejumlah dana yang dialokasikan dalam anggaran oleh Pemda untuk dibelanjakan dalam bentuk aset (tanah, bangunan, mesin dan aset lainnya). Dan nilai pertumbuhan Anggaran Belanja Modal merupakan nilai yang dianalisis pada penelitian ini. Untuk mendapatkan nilai tersebut, digunakan formula rasio pertumbuhan berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan ABM} = \frac{ABM_n - ABM_{n-1}}{ABM_{n-1}}$$

(Mahmudi, 2006:146)

Ket: n : tahun anggaran
ABM : anggaran belanja modal

Adapun hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan Anggaran Belanja Modal dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Data Anggaran Belanja Modal
pada Kabupaten dan Kotamadya Di Jawa Barta

NO	KAB/KOTA	ANGGARAN BELANJA MODAL (Rp.)			% PERTUMBUHAN	
		2007	2006	2005	2007	2006
1	Kab. Bandung	453.953.785.125,00	246.767.381.000,00	77.384.482.000,00	83,96	218,88
2	Kab. Bekasi	511.991.314.358,60	370.123.826.184,00	370.123.826.184,00	38,33	0,00
3	Kab. Bogor	422.346.557.000,00	355.380.377.000,00	638.856.599.000,00	18,84	-44,37
4	Kab. Ciamis	381.561.021.789,00	196.850.652.707,00	196.850.652.707,00	93,83	0,00
5	Kab. Cianjur	228.208.250.119,00	196.409.115.130,00	87.709.807.505,00	16,19	123,93
6	Kab. Cirebon	169.341.758.370,00	192.740.915.210,00	78.179.858.805,00	-12,14	146,54
7	Kab. Garut	224.475.720.061,00	152.805.202.051,00	59.156.698.407,00	46,90	158,31
8	Kab. Indramayu	226.699.059.800,00	197.807.359.550,00	74.130.201.700,00	14,61	166,84
9	Kab. Karawang	206.650.388.400,00	252.052.415.785,00	145.556.643.750,00	-18,01	73,16
10	Kab. Kuningan	112.845.850.939,00	100.026.600.000,00	100.026.600.000,00	12,82	0,00
11	Kab. Majalengka	204.235.249.919,09	156.324.639.975,76	39.914.241.850,00	30,65	291,65
12	Kab. Purwakarta	83.942.239.104,00	50.142.311.250,00	41.348.354.500,00	67,41	21,27
13	Kab. Subang	217.387.572.572,69	138.578.874.148,94	61.212.677.773,00	56,87	126,39
14	Kab. Sukabumi	189.240.092.452,00	63.305.990.000,00	63.305.990.000,00	198,93	0,00
15	Kab. Sumedang	106.332.502.182,90	121.168.097.919,00	88.640.553.143,70	-12,24	36,70
16	Kab. Tasikmalaya	245.435.424.521,00	233.776.213.935,00	91.748.294.670,00	4,99	154,80
17	Kota Bandung	335.291.697.691,00	115.729.722.500,00	129.274.836.659,00	189,72	-10,48
18	Kota Bekasi	345.722.716.323,00	337.442.117.815,00	263.821.314.817,00	2,45	27,91
19	Kota Bogor	151.957.335.613,36	156.023.407.735,00	84.270.212.150,00	-2,61	85,15
20	Kota Cirebon	97.265.100.927,10	85.324.196.450,00	41.415.991.052,00	13,99	106,02
21	Kota Depok	254.689.342.199,25	187.769.542.175,00	165.395.834.560,00	35,64	13,53
22	Kota Sukabumi	73.609.087.000,00	79.951.062.000,00	46.670.644.000,00	-7,93	71,31
23	Kota Cimahi	133.080.083.965,00	111.616.081.400,00	84.300.095.000,00	19,23	32,40
24	Kota Tasikmalaya	117.299.572.000,00	119.361.417.000,00	69.786.522.000,00	-1,73	71,04
25	Kota Banjar	167.433.639.346,00	100.019.858.024,00	37.210.324.900,00	67,40	168,80

Sumber: hasil pengolahan Ms Excel (berdasarkan data BPK), 2009

Berdasarkan tabel 4.4 di atas untuk tahun anggaran 2007 yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2006 menunjukkan bahwa terdapat beberapa pemda yang melakukan alokasi belanja modal dibawah anggaran tahun

sebelumnya yaitu Kotamadya Tasikmalaya, Kotamadya Sukabumi, Kotamadya Bogor, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon dengan nilai masing-masing seperti terlihat pada tabel 4.4 di atas. Sedangkan Kabupaten Sukabumi dan Kotamadya Bandung mampu melakukan alokasi anggaran hampir mencapai dua kali lipat dari sebelumnya, yaitu sebesar 198,93% dan 189,72%. Dan untuk tahun anggaran 2006 yang dibandingkan dengan tahun anggaran 2005 menunjukkan bahwa sebagian besar pemda mengalami kenaikan pertumbuhan alokasi anggaran belanja modal terutama untuk Kabupaten Bandung yang mencapai 218,88%. Dan hanya Kotamadya Bandung yang melakukan penurunan Anggaran Belanja Modal yaitu sebesar -10,48% dari anggaran tahun sebelumnya.

4.1.3 Analisis Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik sebagai alat analisis dalam mengolah data variabel penelitian. Penggunaan statistik parametrik lebih banyak digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk interval dan rasio, dengan dilandasi beberapa persyaratan atau asumsi tertentu. Penelitian ini menggunakan metode korelasional, maka analisis yang dipakai adalah analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun tahapan analisis data dalam melakukan pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut:

4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat pengujian data sebelum dilakukan analisis dengan menggunakan analisis korelasi. Uji asumsi klasik diperlukan untuk memaksimalkan keakuratan pada hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis yang dilakukan. Adapun uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah:

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Sebuah model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat Multikolinieritas pada sebuah model adalah dengan melihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 " (Ghozali, 2001: 91-92). Berikut ini adalah hasil perhitungan uji multikolinieritas :

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.990	161.851		.018	.985		
	Pendapatan Asli Daerah	1.970	6.012	.041	.328	.744	.826	1.210
	Dana Alokasi UMum	6.034	3.526	.219	1.711	.091	.788	1.269
	Dana Bagi Hasil	-5.302	3.898	-.160	-1.360	.178	.933	1.072

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal

Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa, tidak terdapat satupun variabel yang mempunyai nilai VIF > 10 dan Tolerance yang mendekati 0,10, artinya ketiga variabel *independent* tersebut tidak terdapat hubungan multikolinearitas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah di dalam model terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Adapun untuk melihat penyimpangan autokorelasi dalam penelitian ini, maka digunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Dan hasilnya seperti terlihat pada tabel 4. dibawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.260 ^a	.068	.029	758.51904	2.282

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi UMum

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal

a Predictors: (Constant), DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASIUMUM

b Dependent Variable: ANGGARAN BELANJA MODAL

Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

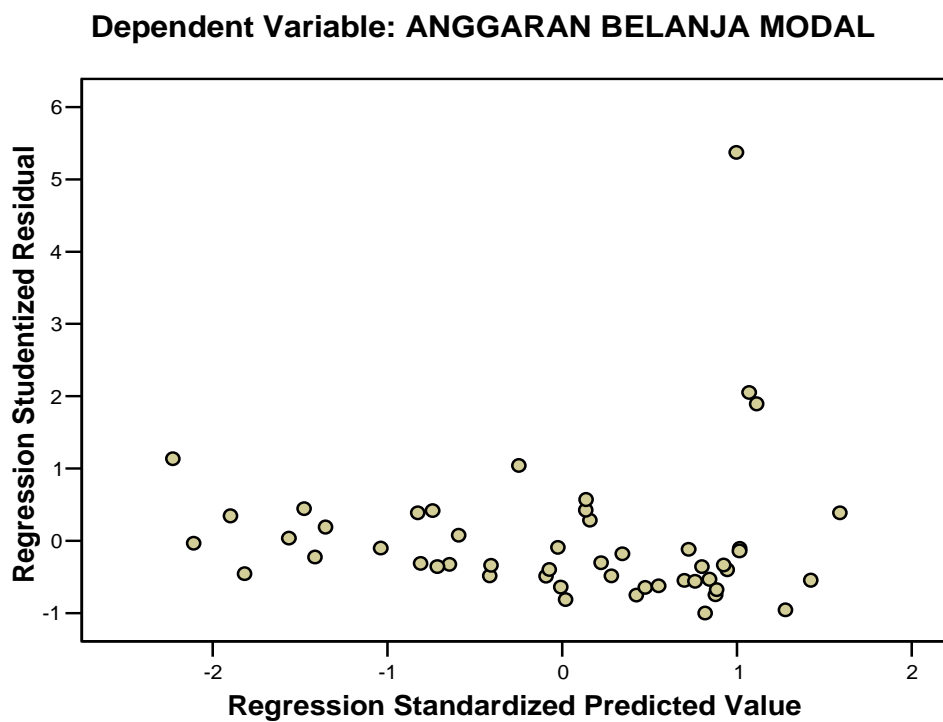
Berdasarkan tabel 4.6 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai DW hitung (d) sebesar 2,282. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai DW tabel dengan jumlah variabel independen sebanyak 3 dan jumlah sampel sebanyak 50 maka didapat nilai DW tabel adalah 1,67. Oleh karena nilai DW hitung (2,031) lebih besar dari batas bawah 1,67 (*du*) dan kurang dari batas atas 4-*du* (2,33), maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Sebuah model yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Berikut ini adalah hasil dari grafik *scatterplot*.

Gambar 4.1
Grafik Scatterplot

Scatterplot



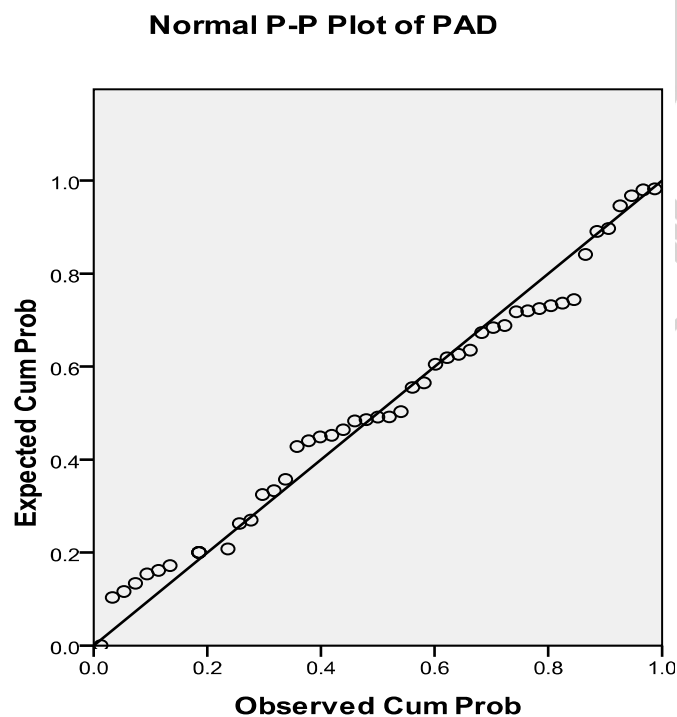
Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berdasarkan gambar grafik dimana titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

4. Uji Normalitas

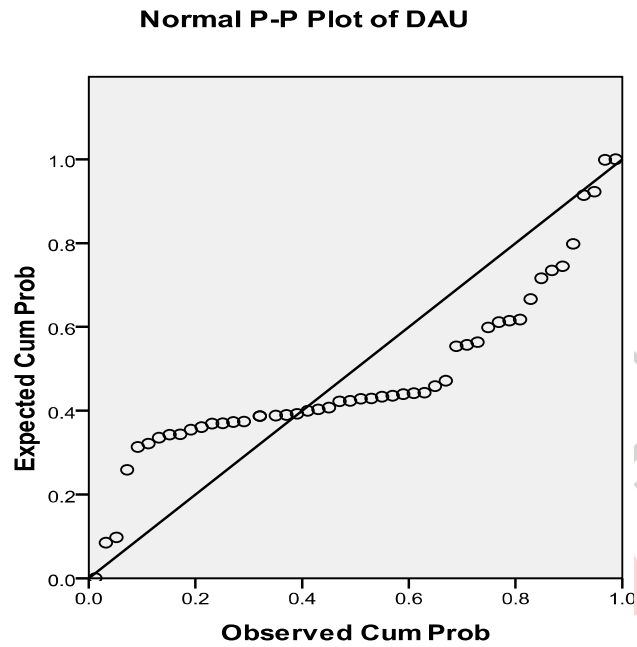
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model linier variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Sebuah model yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, adalah dengan menggunakan grafik *Normal Probability Plot* seperti terlihat pada gambar 4.2, gambar 4.3, gambar 4.4 dan gambar 4.5 untuk setiap variabel i bawah ini:

Gambar 4.2



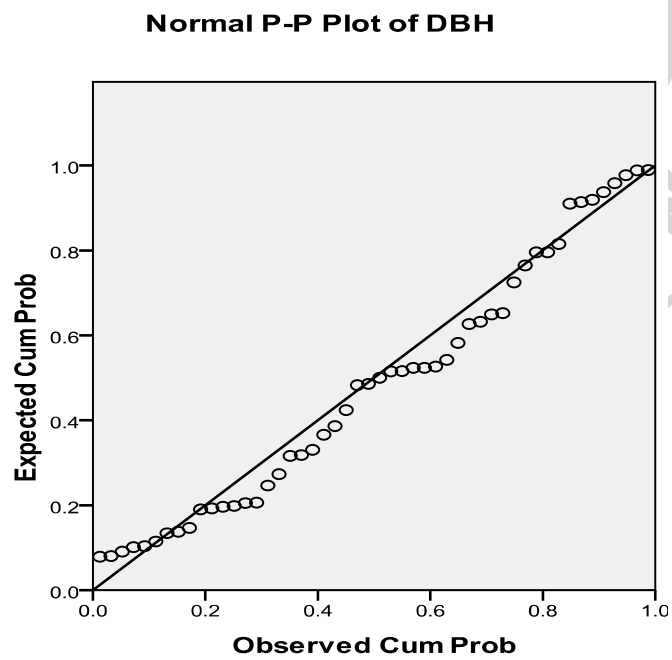
Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Gaambar 4.3



Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

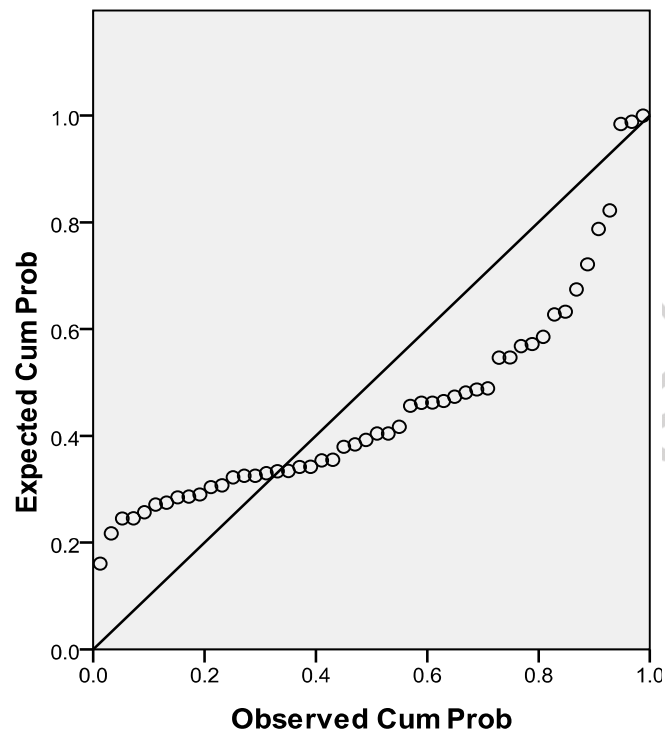
Gaambar 4.4



Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Gaambar 4.4

Normal P-P Plot of ABM



Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Berdasarkan tampilan grafik *Normal Probability Plot* pada gambar 4.2 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, gambar 4.3 untuk variabel Dana Alokasi Umum, gambar 4.4 untuk variabel Dana Bagi Hasil, dan gambar 4.5 untuk variabel Anggaran Belanja Modal di atas menunjukkan bahwa pada keempat grafik *Normal Probability Plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar dan terletak tepat pada garis diagonal. Walaupun penyebaran titik-titik untuk grafik 4.3 dan grafik 4.5 sedikit menjauh dari garis diagonal, tetapi masih membentuk pola garis diagonal. Menurut Ghozali (2001: 112) menyatakan bahwa, “jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram

menunjukkan pola distribusi normal, maka model memenuhi asumsi normalitas". Sehingga dapat disimpulkan dari drafik-grafik di atas bahwa model dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

5. Uji Linieritas

Uji linieritas menunjukan bahwa untuk persamaan model dalam penelitian, hubungan yang terjadi antara variabel dependen dengan variabel independen harus linier. Adapun cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan analisis uji Lagrange Multiplier.

Tabel 4.7
Analisis Uji Lagrange Multiplier

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.260 ^a	.068	.029	758.51904

Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Berdasarkan tabel 4.7 didapat nilai R^2 sebesar 0,068 dengan jumlah n observasi sebanyak 50 maka, besarnya nilai c_2 hitung adalah 3,4 ($50 \times 0,068$). Nilai c_2 hitung dibandingkan dengan nilai c_2 tabel dengan $df=50$ dan tingkat signifikasi 0,05 maka di dapat nilai c_2 tabel sebesar 67,5. Oleh karena nilai c_2 hitung $<$ c_2 tabel maka, model persamaan dalam penelitian adalah model linier.

4.1.3.2 Koefisien Korelasi Parsial

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan koefisien korelasi parsial, dihitung dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.0 *for Windows*.Adapaun hasil perhitungan Koefisien Korelasi Parsial untuk setiap variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.8, tabel 4.9, dan tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Korelasi Parsial
Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Modal

Control Variables			Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Belanja Modal
Dana Alokasi UMum Pendapatan & Dana Bagi Hasil Asli Daerah	Correlation		1.000	.039
	Significance (2-tailed)		.	.744
	df		0	72
Anggaran Belanja Modal	Correlation		.039	1.000
	Significance (2-tailed)		.744	.
	df		72	0

Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat terlihat bahwa koefisien korelasi parsial antara Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Modal adalah sebesar 0,039. Hal ini menunjukkan bahwa setelah di kontrol oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, terdapat hubungan yang bersifat linier positif antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Modal. Dan tingkat hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut sangat lemah.

Tabel 4.9
Koefisien Korelasi Parsial
Antara Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal

Control Variables			Dana Alokasi UMum	Anggaran Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah & Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi UMum	Correlation	1.000	.198
		Significance (2-tailed)	.	.091
		df	0	72
Anggaran Belanja Modal		Correlation	.198	1.000
		Significance (2-tailed)	.091	.
		df	72	0

Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat terlihat bahwa koefisien korelasi antara Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal adalah sebesar 0,198. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dikontrol oleh variabel Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Bagi Hasil, terdapat hubungan yang bersifat linier positif antara variabel Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal. Dan tingkat hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut sangat lemah.

Tabel 4.10
Koefisien Korelasi Parsial
Antara Dana Bagi Hasil dengan Anggaran Belanja Modal

Control Variables			Anggaran Belanja Modal	Dana Bagi Hasil
Pendapatan Asli Daerah & Dana Alokasi UMum	Anggaran Belanja Modal	Correlation	1.000	-.158
		Significance (2-tailed)	.	.178
		df	0	72
Dana Bagi Hasil	Dana Bagi Hasil	Correlation	-.158	1.000
		Significance (2-tailed)	.178	.
		df	72	0

Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat terlihat bahwa koefisien korelasi antara Dana Bagi Hasil dengan Anggaran Belanja Modal adalah sebesar -0,158. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dikontrol oleh variabel Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum, terdapat hubungan yang bersifat linier negatif antara variabel Dana Bagi Hasil dengan Anggaran Belanja Modal. Dan tingkat hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut sangat lemah.

4.1.3.3 Koefisien Korelasi Simultan

Dalam penelitian ini, koefisien korelasi simultan antara variabel independen dan variabel dependen juga dihitung dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.0 for Windows. Adapun hasil perhitungan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Koefisien Korelasi Simultan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.260 ^a	.068	.029	758.51904

a Predictors: (Constant), DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASIUMUM

b Dependent Variable: ANGGARAN BELANJA MODAL

Sumber: hasil pengolahan SPSS 17.0 for Windows, 2009

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa koefisien korelasi antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil, secara simultan dengan Anggaran Belanja Modal adalah sebesar 0,26. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier positif antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan dengan Anggaran Belanja Modal. Dan tingkat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut adalah tingkatan hubungan yang sedang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan dana Bagi Hasil

4.2.1.1 Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Analisis deskriptif mengenai Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

	N	Minimum	Maksimum	Geometric Mean
Pendapatan Asli Daerah	50	-9.04	56.02	16.22

Sumber: hasil pengolahan Ms Excel, 2009

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa, pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat secara rata-rata geometri setiap pemda mendapatkan realisasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,22% untuk tahun anggaran yang diteliti. Dan nilai maksimum realisasi pertumbuhan pendapatan tersebut adalah sebesar 56,02% untuk tahun anggaran yang diteliti. Nilai tersebut dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya, dimana Pemda Tasikmalaya memperoleh peningkatan PAD dalam bentuk pajak, retribusi, maupun pendapatan daerah lainnya yang dapat meningkatkan kas daerah. Sedangkan nilai minimum realisasi pertumbuhan pendapatan ini adalah sebesar -8,04% untuk tahun anggaran yang diteliti. Nilai tersebut dimiliki oleh Kabupaten Majalengka, dimana sebagian pendapatan yang seharusnya sudah masuk ke dalam kas pemda tetapi belum dapat ditagih, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Selain itu juga, hal tersebut bisa terjadi karena tingkat kinerja bagian penagihan mengalami penurunan. Akibatnya banyak pendapatan yang terlambat untuk ditagih dan disetor ke kas pemda. Dan adanya kebijakan penghapusan terhadap pajak atau retribusi yang memberatkan publik.

4.2.1.2 Analisis Deskriptif Dana Alokasi Umum

Analisis deskriptif mengenai Dana Alokasi Umum pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Analisis Deskriptif Dana Alokasi Umum

	N	Minimum	Maksimum	Geometric Mean
Dana Alokasi Umum	50	0	197.54	34.68

Sumber: hasil pengolahan Ms Excel, 2009

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa, pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat secara rata-rata geometri setiap pemda mendapatkan realisasi pertumbuhan pendapatan dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum sebesar 34,68% untuk tahun anggaran yang diteliti. Dan nilai maksimum realisasi pertumbuhan pendapatan tersebut adalah sebesar 197,54% untuk tahun anggaran yang diteliti. Sedangkan nilai minimum realisasi pertumbuhan pendapatan ini adalah sebesar 0% untuk tahun anggaran yang diteliti.

Dan berdasarkan tujuan pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat ke daerah, Dana Perimbangan merupakan dana yang ditujukan untuk membantu keuangan daerah dalam membiayai pembelanjaan yang akan dilakukan. Dan besarnya Dana Alokasi Umum yang diperoleh setiap pemda didasarkan kepada celah fiskal dan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. “DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar” (PP No 55 tahun 2005 pasal 40 ayat 1). Sehingga nilai maksimum yang terjadi dan dimiliki oleh Kotamadya Banjar dikarenakan Pemda Banjar sebagai daerah otonom baru mengalami celah fiskal yang lebar untuk melakukan pembelanjaan sehingga, memerlukan dana bantuan yang lebih besar pula dari pusat. Begitu pula sebaliknya, nilai minimum yang terjadi dan dimiliki oleh Kabupaten Bekasi akibat dari kemampuan fiskal dalam anggaran sangat besar dan hampir mampu untuk menutupi pos pembelanjaan yang dilakukan. Sehingga porsi bantuan dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

4.2.1.3 Analisis Deskriptif Dana Bagi Hasil

Analisis deskriptif mengenai Dana Bagi Hasil pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Analisis Deskriptif Dana Bagi Hasil

	N	Minimum	Maksimum	Geometric Mean
Dana Bagi Hasil	50	-45.54	90.62	15.69

Sumber: hasil pengolahan Ms Excel, 2009

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa, pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat secara rata-rata geometri setiap pemda mendapatkan realisasi pertumbuhan pendapatan dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil sebesar 15,69% untuk tahun anggaran yang diteliti. Dan nilai maksimum realisasi pertumbuhan pendapatan tersebut adalah sebesar 90,62% untuk tahun anggaran yang diteliti. Sedangkan nilai minimum realisasi pertumbuhan pendapatan ini adalah sebesar -45,54% untuk tahun anggaran yang diteliti.

Besarnya nilai maksimum Dana Bagi Hasil yang terjadi dan dimiliki oleh Kotamadya Sukabumi didasarkan pada persentase yang telah ditetapkan berdasarkan perundangan. Dan sumber dana ini berasal dari hasil pengolahan sumber daya alam dan pemungutan pajak. Namun adanya ketidakstabilan pada hasil yang diperoleh membuat Kotamadya Sukabumi memiliki nilai minimum pada tahun 2006, dimana pada tahun tersebut terjadi pengurangan hasil pengolahan sumber daya alam. Dan sekaligus nilai maksimum pada tahun 2007, dimana pada tahun tersebut terjadi peningkatan hasil pungutan pajak.

4.2.2 Analisis Deskriptif Anggaran Belanja Modal

Analisis deskriptif mengenai Anggaran Belanja Modal pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15
Analisis Deskriptif Anggaran Belanja Modal

	N	Minimum	Maksimum	Geometric Mean
Anggaran Belanja Modal	50	-44.37	291.65	45.929

Sumber: hasil pengolahan Ms Excel, 2009

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa, pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat secara rata-rata geometri pertumbuhan Anggaran Belanja Modal yang dilakukan oleh setiap pemda adalah sebesar 45,92% untuk tahun anggaran yang diteliti. Dan nilai maksimum pertumbuhan Anggaran Belanja Modal adalah sebesar 291,65% untuk tahun anggaran yang diteliti. Sedangkan nilai minimum pertumbuhan Anggaran Belanja Modal adalah sebesar -44,37% untuk tahun anggaran yang diteliti.

Nilai maksimum tersebut dimiliki oleh Kabupaten Majalengka. Hal ini terjadi karena pemda melakukan berbagai kebijakan belanja yang mampu meningkatkan pembangunan daerah, sehingga dapat menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang pada akhirnya dinikmati publik. Lain halnya dengan yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor yang memiliki nilai anggaran belanja modal paling kecil (minimum), dikarenakan pemda melakukan kebijakan belanja dengan porsi yang lebih banyak untuk belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal. Padahal belanja operasional sangat kurang

manfaatnya bagi publik dibandingkan dengan belanja modal yang secara nyata dapat dirasakan manfaatnya.

Dan pada intinya belanja modal ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi rata-rata pertumbuhan anggaran belanja modal di Jawa Barat seperti yang terlihat pada tabel 4.15 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemda.

4.2.3 Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara Parsial dan Simultan, dengan Anggaran Belanja Modal

4.2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian koefisien korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Modal setelah dikontrol oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil adalah sebesar 0,039. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan Anggaran Belanja Modal. Ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Belanja Modal diterima. Dan hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linier positif, dengan tingkat hubungan diantara kedua variabel sangat rendah.

Walaupun hubungan diantara kedua variabel sangat rendah, tetapi pertumbuhan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah menjadi perhatian tim anggaran pemda dalam pengambilan keputusan untuk melakukan alokasi Anggaran Belanja Modal pada tahun yang diteliti. Karena penetapan dan penggunaan Pendapatan Asli Daerah bisa dilakukan oleh pemda bersama DPRD tanpa adanya intervensi yang lebih dalam dari pusat, seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2002) dalam bukunya bahwa “Penggunaan PAD lebih leluasa dialokasikan oleh setiap pemda dibandingkan dana perimbangan yang ketentuannya telah ditetapkan melalui peraturan”

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yutikasari (2007), dengan menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2004-2005 pada kabupaten dan kotamadya se Jawa Bali. Hasil penelitian Darwanto dan Yustikasai (2007) menunjukkan bahwa “variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki korelasi positif dan signifikan dengan Belanja Modal”. Selain itu juga, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), dengan menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2001-2004 pada kabupaten dan kotamadya se Jawa Bali. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa “variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan”.

Dengan demikian, setiap pertumbuhan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun pendapatan

lain yang sah memiliki hubungan dengan alokasi Anggaran Belanja Modal pada setiap pemda di Jawa Barat untuk tahun yang diteliti.

4.2.3.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian koefisien korelasi antara Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal setelah dikontrol oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil adalah sebesar 0,199. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memiliki hubungan dengan Anggaran Belanja Modal. Ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Anggaran Belanja Modal diterima. Dan hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linier positif, dengan tingkat hubungan diantara kedua variabel lemah.

Hal ini memungkinkan pertumbuhan yang terjadi pada Dana Alokasi Umum menjadi perhatian tim anggaran baik dari Pemda dan DPRD dalam pengambilan keputusan untuk melakukan alokasi Anggaran Belanja Modal pada tahun yang diteliti. Dan Dana Alokasi Umum oleh pusat kepada daerah berdasarkan PP No. 55 tahun 2005 pasal 40:

- (1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- (5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Walaupun peruntukan yang utama dari dana ini adalah untuk gaji dan tunjangan PNS. Namun tidak semua dana ini disalurkan untuk hal tersebut,

melainkan ada sebagian yang dialokasikan oleh Pemda dan DPRD untuk Anggaran Belanja Modal yang lebih bermanfaat untuk publik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yutikasari (2007), dengan menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2004-2005 pada kabupaten dan kotamadya se Jawa Bali. Hasil penelitian Darwanto dan Yustikasai (2007) menunjukkan bahwa “variabel Dana Alokasi Umum memiliki korelasi positif dan signifikan dengan variabel Belanja Modal”. Selain itu juga, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), dengan menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2001-2004 pada kabupaten dan kotamadya se Jawa Bali. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa “variabel Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum memiliki hubungan yang positif dan signifikan”. Dan penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Abdullah (2008), dengan menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2003-2004 pada 32 sampel kabupaten dan kotamadya di Pulau Sumatra. Hasil penelitian Halim dan Abdullah (2008) menunjukkan bahwa “Anggaran Belanja Modal berasosiasi dengan Dana Perimbangan”. Dana Perimbangan yang dimaksud dalam penelitian Halim dan Abdullah adalah keseluruhan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Dengan demikian, setiap pertumbuhan yang terjadi paada Dana Alokasi Umum memiliki hubungan dengan Anggaran Belanja Modal pada setiap Pemda di Jawa Barta untuk tahun yang diteliti.

4.2.3.3 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Anggaran Belanja

Modal

Hasil pengujian koefisien korelasi antara Dana Bagi Hasil dengan Anggaran Belanja Modal setelah dikontrol oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum adalah sebesar $-0,158$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil memiliki hubungan dengan Anggaran Belanja Modal. Ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Anggaran Belanja Modal diterima. Dan hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linier negatif, dengan tingkat hubungan yang terjadi diantara kedua variabel tersebut adalah rendah.

Hasil koefisien yang negatif terjadi karena komponen Dana Bagi Hasil yang terdiri dari sumber daya mengalami penurunan hasil pengolahan. Penurunan hasil sumber daya alam terjadi bisa disebabkan oleh jenis dari sumber daya itu sendiri yang tidak dapat diperbaharui kembali. Sehingga hasil yang diperoleh dari tahun ketahun mengalami penurunan.

Walaupun demikian, pertumbuhan yang terjadi pada Dana Bagi Hasil menjadi perhatian pemda dalam melakukan pengambilan keputusan untuk alokasi Anggaran Belanja Modal pada tahun yang diteliti. Dan menurut Halim dan Abdullah (2008: 3) menyatakan bahwa “Di sisi lain pembiayaan untuk kedua anggaran tersebut juga berbeda. Belanja modal pada umumnya berasal dari dana bantuan (*fund*), sedangkan pendanaan untuk belanja operasional cenderung bersumber dari pendapatan”. Sehingga penggunaan Dana Bagi Hasil sebagai

bagian dari dana bantuan perimbangan keuangan dari pusat, memiliki hubungan dan menjadi perhatian pemda dalam melakukan alokasi Anggaran Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Abdullah (2008), dengan menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2003-2004 pada 32 sampel kabupaten dan kotamadya di Pulau Sumatra. Hasil penelitian Halim dan Abdullah (2008) menunjukkan bahwa “Anggaran Belanja Modal berasosiasi dengan Dana Perimbangan”. Dana Perimbangan yang dimaksud dalam penelitian Halim dan Abdullah adalah keseluruhan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Dengan demikian, setiap pertumbuhan yang terjadi pada Dana Bagi Hasil memiliki hubungan dengan Anggaran Belanja Modal pada setiap pemda di Jawa Barat untuk tahun yang diteliti.

4.2.3.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama dengan Alokasi Anggaran Belanja Modal

Hasil pengujian koefisien korelasi antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil, secara simultan dengan Anggaran Belanja Modal adalah sebesar 0,26. Berdasarkan hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan memiliki hubungan dengan variabel dependen. Ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan dengan Anggaran Belanja Modal diterima. Dan hubungan antara variabel dependen dan independen tersebut bersifat linier positif, dengan tingkat hubungan yang sedang diantara kedua variabel tersebut. Sehingga pertumbuhan yang terjadi pada pendapatan-pendapatan yang secara *real* diterima menjadi perhatian pemda dalam melakukan pengambilan kebijakan untuk alokasi Anggaran Belanja Modal pada tahun yang diteliti.

Apalagi alokasi Anggaran Belanja Modal dikaitkan dengan komitmen pemda dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik yang sudah menjadi sebuah kewajiban. Dan menurut Halim dan Abdullah (2008:4) menyatakan bahwa:

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, yakni operasional dan belanja modal

Dengan demikian, setiap pertumbuhan yang terjadi pada sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil memiliki hubungan dengan alokasi Anggaran Belanja Modal pada setiap pemda di Jawa Barat untuk tahun yang diteliti. Sedangkan setiap pertumbuhan yang terjadi pada Dana Alokasi Umum hampir tidak memiliki hubungan dengan alokasi Anggaran Belanja Modal.